

Judul : Delegasi DPR RI Konsisten Dukung Kemerdekaan Rakyat Palestina di PUIC
Tanggal : Selasa, 06 Februari 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 5

DELEGASI DPR RI KONSISTEN DUKUNG KEMERDEKAAN RAKYAT PALESTINA DI PUIC

Sebagai penggagas berdirinya Komisi Tetap Palestina pada The Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), DPR RI konsisten mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan memberikan masukan konstruktif bagi kemerdekaan rakyat Palestina. Pada kesempatan tersebut, delegasi Indonesia diwakili Ketua BKSAP Dr Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat) mendesak agar Komisi Tetap Palestina melakukan langkah-langkah nyata sebagai bagian dari dukungan penuh PUIC terhadap perjuangan rakyat Palestina.

"Pada sidang itu saya menyampaikan gagasan kunjungan anggota Komisi Tetap Palestina ke Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem) dan Jalur Gaza. Saya tegaskan bahwa langkah tersebut sebagai komitmen dukungan penuh PUIC terhadap kemerdekaan Palestina," tegas politisi senior Partai Demokrat tersebut di Sidang Umum PUIC ke-13, di Teheran, Iran, baru-baru ini.

Gagasan kunjungan ke Yerusalem memicu polemik antar anggota Komisi Tetap Palestina. Sebagian mendukung penuh ide tersebut namun ada beberapa lagi menolak lantaran kunjungan itu dapat ditafsirkan pengakuan atas eksistensi negara penjajah Israel. Beberapa yang lain berargumentasi karena alasan teknis.

Terkait penolakan alasan teknis tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI itu bersedia mengajukan diri mengatur dan memimpin delegasi Komisi Tetap Palestina ke Al-Quds Al-Sharif. "Jika sekretariat PUIC keberatan mengatur kunjungan ke Yerusalem, saya bersedia dan siap memimpin serta mengatur keberangkatan delegasi ini ke sana," tegasnya.

Sementara itu, terkait kunjungan ke Jalur Gaza, sebagian besar forum mendukung penuh gagasan Indonesia tersebut. Mereka meminta sekretariat PUIC memikirkan cara berkunjung ke Jalur Gaza yang masih terisolasi. Delegasi Indonesia sendiri meminta bantuan Mesir agar membuka akses ke Jalur Gaza. "Mesir sebagai anggota PUIC diminta membuka akses ke Gaza," kata politisi asal Jawa Timur itu.

Pada sidang itu, Nurhayati juga mendesak agar negara-negara anggota PUIC meningkatkan kerja sama bilateral dengan Palestina dalam berbagai sektor, antara lain politik, sosial dan ekonomi. dia

juga mengingatkan, kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan agar mendapatkan perlindungan yang memadai dari aksi-aksi terorisme Israel.

Nurhayati Ali Assegaf yang pernah menjabat ketua BKSAP DPR RI ini pernah menyatakan konflik antara Palestina dengan Israel setelah dipasangnya metal detector di Masjid Al-Aqsa Palestina, telah menyedot perhatian dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan Palestina bukan hanya permasalahan masyarakat yang ada di sana, tetapi permasalahan masyarakat dunia.

Pertengahan tahun lalu, Nurhayati mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam penyelesaian konflik di Palestina. Ia mendesak pemerintah untuk mengirim menteri luar negeri RI hingga pasukan perdamaian.

"Kami (DPR, Red) minta pemerintah Indonesia proaktif. Saat ini memang sudah dilakukan respons terhadap Palestina dari pemerintah. Tetapi harus ada tindak lanjut nyata. Apalagi kedekatan emosional Indonesia dengan Palestina cukup dekat," tegas Nurhayati dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Demokrat itu mengatakan BKSAP sudah melakukan beberapa upaya, di antaranya membangun komunikasi dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk meminta Israel menghentikan serangan. Selain itu, IPU juga diminta mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk segera mengambil sikap.

"Israel sudah di luar batas yang bisa ditoleransi, karena ini kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Dunia sudah sepekat penyelesaian lewat two state solution. Tetapi Israel telah melanggar kesepakatan PBB yang menegaskan hukum internasional tentang hak beragama dan pelanggaran mengubah status tempat suci," tegasnya.

Masih, kata Nurhayati, Pemerintah Indonesia harus mendesak PBB untuk memaksa Israel mematuhi semua instrumen hukum internasional. Pasalnya dengan jelas dan gampal Israel telah melanggar sejumlah Resolusi PBB, khususnya Resolusi PBB Nomor 46 (17 April 1948) tentang Palestine Question, 271 (15 September 1969) tentang Middle East, dan 452 (20 Juli 1979) tentang wilayah yang diduduki

Israel.

Kemudian, 672 (12 Oktober 1990) tentang wilayah yang diduduki Israel, 1073 (28 September 1996) tentang situasi di Yerusalem, Nablus, Ramallah, Bethlehem, dan Jalur Gaza, 1322 (17 Oktober 200) tentang Middle East Including Palestine Question, dan 2334 (23 Desember 2016) tentang Middle East Question.

"Sebagian di antara resolusi tersebut secara khusus menegaskan hukum internasional mengenai hak-hak beragama dan melarang Israel mengambil tindakan untuk mengubah status tempat-tempat suci di Yerusalem, terutama kami menyesalkan penodaan Masjid Al-Aqsa," ungkapnya.

DPR melalui BKSAP, berkomitmen memperjuangkan nasib Palestina secara aktif di berbagai forum parlemen dunia seperti IPU dan PUIC. "Kami berjuang menggalan resolusi, rekomendasi, maupun keputusan-keputusan yang membela kemerdekaan dan kebebasan Palestina," tegas politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Pada kesempatan terpisah, Nurhayati Ali Assegaf mengapresiasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang telah menetapkan tarif nol untuk

"Saya kira, zero tariff untuk



Palestina ini luar biasa, dengan adanya zero tariff ini produk Palestina bisa lebih kompetitif," papar Nurhayati di Jakarta, awal tahun ini.

Politisi Fraksi Demokrat ini menambahkan, kebijakan tersebut adalah bentuk konsistensi dan kepedulian Indonesia terhadap Palestina.

Selain tarif nol, delegasi Indonesia juga pernah mengusulkan supaya negara-negara Islam di Timur Tengah berbagi atau sharing zakat, infak, dan sedekah kepada Palestina.

"Sebab, mereka butuh banyak dukungan, tidak hanya dukungan



moril, tetapi juga dukungan finansial,” ujar politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan kebijakan zero tariff tersebut mulai berlaku pada tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Palestina.

Selain itu, pada tahun ini, Pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan kerja sama dalam desalinasi air dan kesehatan dengan Palestina.

Keputusan Sepihak.

Secara terpisah, Rofi' Munawar dari BKSAP DPR RI menilai undakan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem

sebagai ibu kota Israel merupakan keputusan sesat dan ceroboh.

“Kita mengutuk keras atas keputusan Trump akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini bukti Presiden AS telah mengambil keputusan sepihak terhadap persoalan Palestina. Ironisnya keputusan dibuat sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina, sungguh merupakan langkah mundur dan berpotensi menyeret konflik di Timur Tengah yang lebih dalam,” tegas Rofi dalam keterangan pers, baru-baru ini.

Politisi dari Fraksi PKS ini memandang keputusan Trump sesat karena tidak dilandasi

argumentasi yang memadai dan pertimbangan yang matang. Selain desakan dari berbagai pemimpin dunia, sudah banyak kajian serta keputusan yang menegaskan Israel tidak memiliki hak atas Yerusalem.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mengeluarkan sebuah resolusi yang mengecam ekskavasi (pengakuan) Israel di Yerusalem. UNESCO menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

Bahkan jauh sebelum itu, di tahun 1980, atas usaha yang sama Israel pernah mengesahkan secara sepihak undang-undang yang menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Namun, hal itu ditentang PBB lewat resolusi baru dan menyatakan langkah Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.

“Keputusan Trump tersebut secara terang benderang menegaskan bahwa AS tidak dapat diharapkan lagi sebagai salah satu negara sponsor pembicaraan damai Palestina-Israel yang sudah terhenti sejak tahun 2014. AS di bawah kepemimpinan Trump telah kehilangan legitimasinya. Alih-alih sponsor perdamaian, AS seperti membojorkan keinginan Benjamin Netanyahu yang keras kepala,” jelasnya.

Dia menambahkan, keputusan Trump adalah sebuah kecerobohan paling fatal dalam sejarah diplomatik AS. Meski 1995 muncul keputusan penting di Kongres AS pengesahan undang-undang terkait pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

UU tersebut tak pernah direalisasikan sepanjang era Kepresidenan Bill Clinton, George W Bush, hingga Barack Obama. Mereka semua menolaknya, karena memahami dampak yang akan dihasilkan bersifat negatif

“Langkah Trump ini seakan menegaskan kebijakan AS di Timur Tengah selama ini, dipastikan akan mengganggu sekutu tradisional mereka di wilayah tersebut. Selain itu akan mempersulit terwujudnya perdamaian Palestina-Israel, bahkan semakin mengeskalasi ketegangan di kawasan. Dampak sangat serius dari keputusan Trump tersebut adalah menumbuhkan subur benih-benih terorisme dan anti-Amerika di mana-mana,” ujar Rofi.

Terkait hal ini, BKSAP mendorong Menteri Luar Negeri RI memanggil kembali Duta Besar AS di Jakarta untuk memberikan penjelasan atas keputusan Trump dan menyampaikan protes keras secara langsung atas keputusan tersebut.

DPR juga mendorong pemerintah berperan aktif bersama negara-negara OKI lainnya untuk menggelar pertemuan darurat guna menyikapi keputusan Trump tersebut. Selain itu, Pemerintah juga diminta berperan aktif bersama negara-negara lain untuk mendesak DK PBB bersikap tegas atas keputusan Trump itu.

Melalui diplomasi parlemen, DPR sebagai anggota pada Komisi Middle East Question di Inter-Parliamentary Union (IPU), bersama dengan Parlemen Palestina dan parlemen-parlemen anggota OKI yang tergabung pada komisi tersebut, berupaya untuk mengajukan sebuah proposal resolusi yang mengecam keras keputusan Trump tersebut sebagai emergency item pada sidang IPU.

Dalam kapasitas sebagai anggota Executive Committee PUIC (Parliamentary Union of OIC Countries), DPR meminta PUIC menggelar extraordinary